



BADAN PUSAT STATISTIK

Laporan Kinerja Tahun 2023

KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL



Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial



BADAN PUSAT STATISTIK

Laporan Kinerja Tahun 2023

KEDEPUTIAN BIDANG STATISTIK SOSIAL



Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja atau LAKIN adalah gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan instansi tersebut yang dibiayai oleh APBN/APBD. Penyusunan LAKIN didasarkan pada Siklus Anggaran satu tahun.

LAKIN Kedeputian Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial secara periodik. Penyusunan laporan dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN Kedeputian Bidang Statistik Sosial dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja yang mencerminkan *outcome* atau prestasi kerja kedeputian. Rata-rata capaian kinerja indikator kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2023 sebesar 108,15 persen. Penghitungan didasarkan pada skala penilaian yang digunakan sebagai acuan, dapat dikatakan kategori capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2023 berstatus sangat berhasil.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan, sampai terbitnya laporan ini. Semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami terima untuk penyempurnaan laporan dimasa mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2024

Deputi Bidang Statistik Sosial



Ateng Hartono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kedeputan Bidang Statistik Sosial 2	
1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran	2
1.4. Peran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial	5
1.5. Peran Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Reformasi Birokrasi	7
1.6. Potensi dan Permasalahan	9
1.7. Sistematika Penyajian Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial	15
2.2. Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Statistik Sosial 2020-2024	17
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Statistik Sosial 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	23
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja	49
3.3. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2020-2024.....	50
3.4. Prestasi Tahun 2023	51
3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023	58
3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	61
BAB IV PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan Akuntabilitas Kinerja	66
4.2. Rencana Tindak Lanjut	67
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Menurut Jenis Jabatan pada Deputi Bidang Statistik Sosial, Tahun 2023	3
Tabel 2.1.	Pernyataan Visi dan Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial	15
Tabel 2.2.	Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kedeputian Bidang Statistik Sosial.....	16
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis di Kedeputian Bidang Statistik Sosial	17
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Deputi Bidang Statistik Sosial	19
Tabel 3.1.	Skala Kategori Penilaian.....	23
Tabel 3.2.	Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2022 (persen)	24
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2023	24
Tabel 3.4.	Persentase Publikasi Statistik Sosial yang Menyertakan Informasi Akurasi Data, Tahun 2023	26
Tabel 3.5.	Persentase Publikasi Statistik Sosial yang Menyertakan Informasi Akurasi Data Berdasarkan Direktorat, Tahun 2023.....	26
Tabel 3.6.	Daftar Publikasi dengan Menyertakan Nilai Akurasi Data yang Diterbitkan Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Tahun 2023.....	27
Tabel 3.7.	Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan dalam Dokumen RPJMN, Tahun 2023	31
Tabel 3.8.	Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN, Berdasarkan Direktorat, Tahun 2023.....	32
Tabel 3.9.	Daftar Indikator Statistik Sosial yang Digunakan dalam Dokumen RPJMN Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Tahun 2023.....	32
Tabel 3.10.	Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs, Tahun 2023	36
Tabel 3.11.	Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs Berdasarkan Direktorat, Tahun 2023.....	36
Tabel 3.12.	Daftar Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs yang Dihasilkan Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Tahun 2023	37
Tabel 3.13.	Target dan Realisasi K/L/D/I yang Mendapat Pembinaan Statistik dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial	42
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 2.2.1) Kedeputian Bidang Statistik Sosial	43
Tabel 3.15.	Target dan Realisasi Jumlah Aktivitas Pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I, Tahun 2023	45

Tabel 3.16.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 2.2.2) Kedeputian Bidang Statistik Sosial	47
Tabel 3.17.	Perkembangan Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2022-2023 49	
Tabel 3.18.	Capaian Kinerja Tahun 2021-2023 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2020-2024	50
Tabel 3.19.	Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial Berdasarkan Direktorat Periode 2023	59
Tabel 3.20.	Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial Berdasarkan Sasaran dan Program Periode 2023	59
Tabel 3.21.	Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial Berdasarkan Direktorat Periode 2023	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan pada Deputi Bidang Statistik Sosial, Tahun 2023.....	3
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Susunan Organisasi Kedeputian Bidang Statistik Sosial BPS.....	70
Lampiran 2.	Rencana Strategis Kedeputian Bidang Statistik Sosial BPS Tahun 2020-2024 (Reviu).....	71
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Tahun 2023 (Reviu).....	72
Lampiran 4.	Pengukuran Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2023.....	75

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kedeputian Bidang Statistik Sosial disusun sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. LAKIN juga merupakan perwujudan visi dan misi, yang pelaksanaannya telah diupayakan sebagaimana tertuang dalam Renstra Deputi Bidang Statistik Sosial 2020 – 2024 dan juga pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Kedeputian Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas menyediakan data dan informasi dibidang statistik sosial yang meliputi Statistik Kesejahteraan Rakyat, Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan serta Statistik Ketahanan Sosial. Dalam memenuhi tugas pokok tersebut, Kedeputian Bidang Statistik Sosial melakukan pengumpulan data berupa sensus dan survei.

Hasil pendataan sensus dan survei telah disajikan dalam bentuk publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dan Statistik Ketahanan Sosial yang menyertakan akurasi, dan melalui penyajian indikator statistik sosial untuk kepentingan RPJMN dan SDGs. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan prima dalam membina statistik sektoral, Kedeputian Bidang Statistik Sosial telah mewujudkannya melalui penguatan statistik sektoral di K/L/D/I

Evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Kedeputian Bidang Statistik Sosial memperlihatkan capaian kinerja yang baik. Pada tahun 2023, rata-rata capaian kinerja indikator kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial tahun 2023 sebesar 108,15 persen. Penghitungan didasarkan pada skala penilaian yang digunakan sebagai acuan, dapat dikatakan kategori capaian kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial tahun 2023 berstatus sangat berhasil.

Pagu Anggaran Kedeputian Bidang Statistik Sosial tahun 2023 adalah sebesar Rp 48.571.062.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.144.952.822,- atau sebesar 86,77 persen. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja baik kinerja tujuan maupun kinerja sasaran strategis dapat dikatakan Kedeputian Bidang Statistik Sosial telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran.



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tahunan merupakan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Statistik Sosial atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2023 merupakan laporan yang berisi target, sasaran, dan realisasi terhadap tugas dan tanggung jawab Deputi Bidang Statistik Sosial periode tahun 2023. Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Deputi Bidang Statistik Sosial ini.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja setiap tahun.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Deputi Bidang Statistik Sosial selama tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Statistik Sosial dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi,

partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kedeputian Bidang Statistik Sosial

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputy Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, statistik kesejahteraan rakyat, dan statistik ketahanan sosial. Dalam menjalankan tugas, Deputy Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan berbagai fungsi, yaitu:

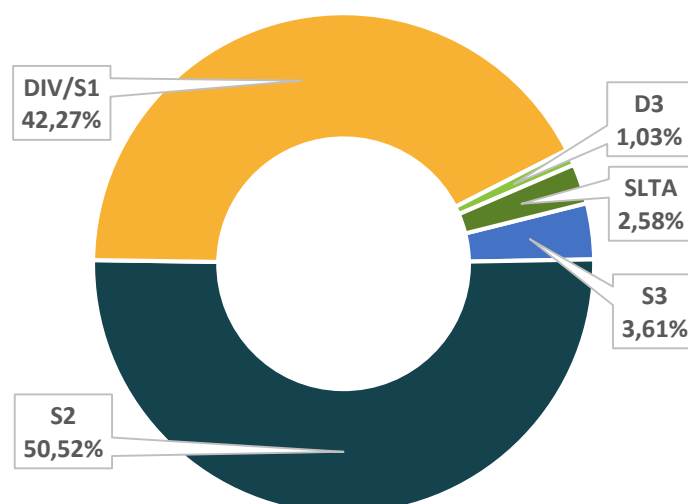
1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
2. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
3. Pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; dan
4. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Susunan Organisasi Deputy Bidang Statistik Sosial terdiri atas Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, dimana masing-masing direktorat tersebut terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran

1.3.1. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputy Bidang Statistik Sosial sehari-harinya didukung oleh 194 orang pegawai yang terdiri atas 7 orang (3,61 persen) berpendidikan S3; 98 orang (50,52 persen) berpendidikan S2; 82 orang (42,27 persen) berpendidikan S1/DIV; 2 orang (1,03 persen) berpendidikan DIII; dan 5 orang (2,58 persen) berpendidikan SLTA.



Gambar 1.1. Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan pada Deputi Bidang Statistik Sosial, Tahun 2023

Gambar 1.1 memperlihatkan kualitas SDM Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2023 tersebut cukup baik dan sudah sangat mendukung dalam menyelesaikan tupoksi Deputi Bidang Statistik Sosial. Secara teknis, SDM yang tersedia juga mampu menerapkan ilmu statistik dan menguasai teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan serta dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

1.3.2. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Fungsional (JF); dan Jabatan Administrasi (JA). Di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial terdapat 1 orang pimpinan tinggi madya, yaitu Deputi Bidang Statistik Sosial, 3 orang pimpinan tinggi pratama, yaitu Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktur Statistik Ketahanan Sosial. Secara keseluruhan, tiga direktur tersebut membawahi 175 orang pejabat fungsional statistisi dan 15 orang fungsional umum, yang disajikan lebih rinci pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Menurut Jenis Jabatan pada Deputi Bidang Statistik Sosial, Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Tahun 2023	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deputi Bidang Statistik Sosial	1	1	100,00

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Tahun 2023	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1	1	100,00
3	Statistisi Ahli Utama	1	0	0,00
4	Statistisi Ahli Madya	12	11	91,67
5	Statistisi Ahli Muda	37	31	83,78
6	Statistisi Ahli Pertama	36	17	47,22
7	Arsiparis Muda	1	0	0,00
8	Arsiparis Pertama	1	0	0,00
9	Pengolah Data	9	0	0,00
10	Sekretaris	1	0	0,00
11	Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat	1	1	100,00
12	Statistisi Ahli Utama	1	1	100,00
13	Statistisi Ahli Madya	15	12	80,00
14	Statistisi Ahli Muda	23	23	100,00
15	Statistisi Ahli Pertama	25	12	48,00
16	Statistisi Mahir	1	1	100,00
17	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0,00
18	Arsiparis Terampil	1	0	0,00
19	Pengolah Data	2	0	0,00
20	Sekretaris	1	0	0,00
21	Direktur Statistik Ketahanan Sosial	1	1	100,00
22	Statistisi Ahli Utama	1	0	0,00
23	Statistisi Ahli Madya	13	13	100,00
24	Statistisi Ahli Muda	25	16	64,00
25	Statistisi Ahli Pertama	30	34	113,33
26	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0,00
27	Arsiparis Terampil	1	0	0,00
28	Pengolah Data	5	0	0,00
29	Sekretaris	1	0	0,00
30	Statistisi Mahir	0	1	100,00
31	Statistisi Penyelia	0	3	100,00
JUMLAH		249	179	71,89

Ditinjau dari jabatan fungsional, 175 orang pegawai sudah terpetakan ke dalam jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut: 1 orang Statistisi Ahli Utama, 36 orang Statistisi Ahli Madya, 70 orang Statistisi Ahli Muda, 63 orang Statistisi Ahli Pertama, 4 orang Statistisi Mahir dan 1 orang Statistisi Penyelia. Selain itu, 15 orang lainnya masih berada pada jabatan fungsional umum karena belum memperoleh penugasan pada jabatan statistisi tertentu.

Komposisi tersebut belum memenuhi seluruh kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Deputi Bidang Statistik Sosial sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 281 Tahun 2021 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2021. Hal ini mengingat jabatan fungsional yang terpenuhi pada Deputi Bidang Statistik Sosial sebesar 70,28 persen. Meskipun demikian, terjadi peningkatan sebesar 2,41 persen pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 (169 menjadi 175 orang pegawai dari total kebutuhan 249 orang pegawai).

1.3.3. Pagu Anggaran Tahun 2023

Dari sisi anggaran, guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp40.225.992.000,- yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp17.906.894.000,-.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat Rp9.542.316.000,-.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial sebesar Rp12.776.782.000,-.

1.4. Peran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024, Deputi Bidang Statistik Sosial mendukung arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020 – 2024 menjadikan Deputi Statistik Sosial memiliki peran strategis pada berbagai hal berikut, antara lain:

1. Data Perencanaan Pembangunan

Kedeputian Bidang Statistik Sosial telah menghasilkan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan, diantaranya data-data strategis dan tujuan pembangunan.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Kedeputian Bidang Statistik Sosial berkomitmen dalam pelaksanaan target TPB dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap indikator statistik sosial. Selain sebagai penyedia data, Deputi Bidang Statistik Sosial berperan dalam mengawal K/L lain dalam penyediaan indikator TPB.

3. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik sosial. Strategi yang dilakukan Deputi Bidang Statistik Sosial antara lain:

- a. Menghasilkan ukuran statistik menurut jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan;
- b. Memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan;
- c. Memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik;
- d. Memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke kuliah/sekolah, kursus, dan pelatihan.

4. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Salah satu survei di Bidang Statistik Sosial terkait modal sosial budaya yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSPB) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Pengumpulan data terkait kebudayaan merujuk pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh Unesco pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

5. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Aspek pemanfaatan teknologi komputasi dilakukan dalam kegiatan statistik seperti *big data* dan *mobile computing*.

6. Statistik Kebahagiaan

Selain menghasilkan indikator statistik obyektif, Kedeputan bidang Statistik Sosial juga menghasilkan statistik subyektif yang menjadi pelengkap dari statistik lainnya yaitu statistik kebahagiaan. Survei terkait statistik kebahagiaan yaitu Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang sudah dilaksanakan tiga kali yaitu tahun 2014, 2017 dan 2021. Idealnya, survei dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, namun pelaksanaan di tahun 2020 ditunda menjadi tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Selain beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Sosial juga memiliki peran strategis dalam mendukung 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang merupakan Prioritas Nasional (PN) periode tahun 2020–2024, di antaranya:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Pelaksanaan SP2020 mendukung PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. PN yang berkaitan dengan Deputi Bidang Statistik Sosial adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan.

2. Pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Pelaksanaan Sakernas mendukung PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.

3. Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pelaksanaan Susenas mendukung PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 3 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing serta PN 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

4. Pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (Podes)

Pelaksanaan Pendataan Podes mendukung PN 2 yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah.

5. Penyusunan Statistik Keamanan

Pelaksanaan penyusunan statistik keamanan mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

6. Pelaksanaan Survei Prilaku Anti Korupsi (SPAK)

Pelaksanaan SPAK mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

7. Pelaksanaan Survei Demokrasi Indonesia

Pelaksanaan Survei Demokrasi Indonesia mendukung PN 7 yaitu memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

1.5. Peran Deputi Bidang Statistik Sosial dalam Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) yang dilaksanakan BPS merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan instansi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan baik. Pelaksanaan RB ini mencakup 8 area perubahan, yaitu : manajemen perubahan; penataan dan penguatan organisasi; penataan peraturan perundang-undangan; penataan SDM; penataan

tata laksana; penguatan pengawasan; penguatan akuntabilitas kinerja; serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala BPS melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 120 tahun 2018 membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi BPS yang bertugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan keputusan tersebut, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat turut berperan mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat antara lain adalah:

1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi yang terdiri atas *Change Champion* (CC) dan *Change Agent Network* (CAN).
2. Terlibatnya Direktur sebagai Ketua Asesor di Kedeputian Bidang Statistik Sosial.
3. Internalisasi *Core Value* Indonesia berAkhhlak.
4. Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Benturan Kepentingan.
5. Penyediaan indikator capaian revolusi mental baik di level pusat maupun provinsi guna mengukur kinerja pemerintah sejalan dengan amanat Presiden dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Selain itu, BPS juga menjadi bagian dari 12 instansi Meso yang fokus pada Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Kemiskinan yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB. Hal ini mengingat peran BPS sebagai salah satu instansi yang terlibat dalam penataan *database* kemiskinan nasional menuju terbangunnya satu data kemiskinan nasional antarsektor. Berkaitan dengan itu, Deputi Bidang Statistik Sosial turut berperan aktif dengan melakukan penguatan di hulu melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta memberikan dukungan di hilir dengan mendukung penyelesaian isu-isu prioritas pemerintah yang salah satunya terkait dengan pengentasan kemiskinan. Adapun bentuk peran Deputi Bidang Statistik Sosial melalui Pendataan Awal Regsosek dan pelaksanaan Survei untuk mengevaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem (Susenas).

Terkait program pengentasan kemiskinan berdasarkan Inpres No.4 Tahun 2022, BPS diamanatkan untuk melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai data dasar. Namun, dikarenakan adanya keterbatasan akses dan hal lainnya untuk menggunakan DTKS sebagai data dasar, sehingga BPS tidak dapat menggunakan DTKS. Di sisi lain, pada tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Pelaksanaan Regsosek menjadi salah satu strategi prioritas nasional khususnya dalam penghapusan kemiskinan

ekstrem yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022. Penyelenggaraan Regsosek juga sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Hasil Reviu Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Adapun langkah awal dari Regsosek adalah melaksanakan Pendataan Awal Regsosek. Sejalan dengan amanat dalam Inpres No. 4 Tahun 2022 dan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, BPS bertugas untuk melakukan Pendataan Awal Regsosek 2022 yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dan menetapkan standarisasi kualitas pemutakhiran berkelanjutan.

Sementara itu, implementasi Inpres No.4 Tahun 2022 pada poin 26 bagian b yakni menyelenggarakan survei sebagai sarana evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian dari survei sosial dan ekonomi nasional juga telah dilaksanakan dengan analisis kondisi kemiskinan ekstrem makro. BPS melalui Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, secara rutin menyelenggarakan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Salah satu output dari hasil Susenas adalah menghasilkan kondisi kemiskinan dimana diantaranya adalah kondisi kemiskinan ekstrem. Susenas juga menghasilkan profil penduduk yang terkategori miskin (termasuk miskin ekstrem). Untuk kebutuhan pemantauan kemiskinan ekstrem, sejak tahun 2022 dan direncanakan hingga tahun 2024, sampel rumah tangga Susenas adalah Rumah tangga panel. Dengan desain sampling panel tersebut maka dinamika penduduk miskin ekstrem akan dapat diketahui sehingga intervensi kebijakan pemerintah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem lebih terarah. Evaluasi kemiskinan ekstrem dilaksanakan mulai akhir tahun 2021 dimana BPS menyelenggarakan Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial (SEPBS) yang bertujuan sebagai pemantauan dan sarana evaluasi keefektifan pemberian bantuan sosial yang diberikan kepada penduduk miskin khususnya penduduk miskin ekstrem.

1.6. Potensi dan Permasalahan

Deputi Bidang Statistik Sosial memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Dalam menjalankan tugasnya, berbagai kegiatan prioritas diselenggarakan Deputi Bidang Statistik Sosial guna menghasilkan berbagai data statistik sosial yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial mampu menghasilkan berbagai ukuran

maupun indikator Statistik Sosial yang berkualitas, lengkap, mutakhir, dan terpercaya. Kelengkapan beragam data statistik sosial selama ini telah mampu memberikan andil penting dalam bidang perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Selanjutnya, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Deputi Bidang Statistik Sosial juga memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam pengumpulan data. Dengan demikian data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*).

Identifikasi potensi yang dimiliki Deputi Bidang Statistik Sosial dalam rangka menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah, yaitu:

1. SDM didominasi oleh pegawai berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian serta ketrampilan khusus (97,42 persen) yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan, baik yang bersifat rutin seperti pelaksanaan kegiatan survei maupun penyusunan publikasi ARC maupun non-ARC, maupun *ad-hoc* yang melibatkan pegawai sebagai narasumber maupun partisipan pada beberapa forum internasional (UNESCAP, UNSC, SESRIC, dan UN *expert group meeting, working group*, dan lain sebagainya);
2. Pemanfaatan data sensus maupun survei dalam penghitungan berbagai indeks yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) berbagai Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024;
3. Kolaborasi dengan lembaga internasional guna menghasilkan indikator global (SDGs), seperti: World Bank dalam penghitungan kemiskinan ekstrem, *United Nations Crime Trend Survey* (UN CTS) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghasilkan data statistik kriminal, UNICEF dalam menyusun Modeling Statistik untuk Estimation Projections ECDI Nasional 2024-2030, dan lain sebagainya;

Adapun identifikasi permasalahan yang menjadi tantangan tersendiri bagi Deputi Bidang Statistik Sosial dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Terdapat kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran setiap Kementerian/Lembaga dengan blokir anggaran atau *Automatic Adjustment* (AA) yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana sehingga memengaruhi beberapa rencana kegiatan, frekuensi serta pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian target kinerja;
2. Perubahan mekanisme pelatihan/FGD/*workshop* dari luring menjadi daring turut berdampak terhadap proses kegiatan dan kualitas yang diharapkan;

3. Belum dilakukannya identifikasi kebutuhan Kementerian/Lembaga sebagai dasar pelaksanaan pembinaan statistik sektoral. Pembentukan Tim Penilai Badan (TPB) guna menilai hasil Evaluasi Pembangunan Statistik Sektoral (EPSS) secara mandiri dari Kementerian/Lembaga diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan tersebut;
4. Pembinaan statistik sektoral yang selama ini dilakukan masih bersifat *ad-hoc* dan asistensi dalam menghitung indikator kinerja Kementerian/Lembaga karena belum tersedianya SDM yang mumpuni pada masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut; dan
5. Dibutuhkan koordinasi lebih lanjut lintas Direktorat dalam menggunakan sumber data yang bukan berasal dari unit kerjanya untuk mendukung capaian kinerja, misalnya pemanfaatan data Sakernas yang berasal dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam publikasi rutin Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

1.7. Sistematika Penyajian Laporan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah mencantumkan mengenai sistematika penyajian laporan. Merujuk pada petunjuk teknis tersebut, Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Deputy Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik mencapai tujuan dan sasaran utama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan juga langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Deputy Bidang Statistik Sosial; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; peran strategis Deputy Bidang Statistik Sosial; pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Statistik Sosial; potensi dan permasalahan serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Statistik Sosial 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Statistik Sosial 2023. Pada

bab ini akan disampaikan visi dan misi, kebijakan dan program indikator serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi langkah-langkah antisipasi yang akan diambil. Disajikan pula alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Selain itu diuraikan pula Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial 2023, Perkembangan Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial, Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2023. Selain itu, bab ini juga menyertakan prestasi yang telah dicapai beserta beberapa inovasi sebagai bagian dari pengembangan SDM di Deputi Bidang Statistik Sosial selama tahun 2023.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial BPS serta strategi pemecahan masalah serta langkah yang akan dilakukan Deputi Bidang Statistik Sosial untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial

Visi Kedeputian Bidang Statistik Sosial dibangun untuk mendukung visi BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024 sebagai “Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Pembangunan nasional di bidang statistik sosial diarahkan agar mampu mengakomodasi tantangan yang berkembang, seperti dukungan dan kerja nyata demi terwujudnya satu data kependudukan di Indonesia, reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, tuntutan tersedianya data dan informasi statistik kependudukan dan ketenagakerjaan pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik, serta penyelenggaraan kegiatan statistik dengan kondisi mobilisasi penduduk yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka dirumuskan visi Kedeputian Bidang Statistik Sosial adalah “Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju”.

Untuk mencapai visi Kedeputian Bidang Statistik Sosial, maka ditetapkan misi yang menggambarkan kegiatan perstatistikan yang harus diwujudkan dengan sungguh- sungguh. Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan Kedeputian Bidang Statistik Sosial yang diselaraskan dengan Misi Badan Pusat Statistik. Rincian Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; dan
2. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

Tabel 2.1. Pernyataan Visi dan Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial

Visi Kedeputian Bidang Statistik	Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju	Misi Kedeputian Bidang Statistik Sosial
		Misi 1: Menyediakan data statistik sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Tujuan yang ditetapkan oleh Kedepuitan Bidang Statistik Sosial mendukung berbagai peran dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang terhadap Badan Pusat Statistik. Tujuan Kedepuitan Bidang Statistik Sosial juga mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kedepuitan Bidang Statistik Sosial 2020-2024. Tujuan Kedepuitan Bidang Statistik Sosial dalam rangka mencapai visi dan mewujudkan misi Kedepuitan Bidang Statistik Sosial 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kedepuitan Bidang Statistik Sosial

Visi Kedepuitan Bidang Statistik Sosial	Penyedia Data Statistik Sosial Berkualitas untuk Indonesia Maju	Misi Kedepuitan Bidang Statistik Sosial
		<p>Misi 1: Menyediakan data statistik sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional</p> <p>Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional</p>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 	
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 	

Tujuan 1: Menyediakan data Statistik Sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:

Misi ke-1: Menyediakan Data Statistik Sosial berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.

Tujuan 2: Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:

Misi ke-2: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik sosial untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kedepuitan Bidang Statistik Sosial. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kedepuitan Bidang Statistik Sosial yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh

adanya hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan pada Kedeputian Bidang Statistik Sosial ini. Adapun tujuan dan sasaran strategis dirumuskan dalam Tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis di Kedeputian Bidang Statistik Sosial

Tujuan (1)	Sasaran Strategis (2)
Menyediakan data Statistik Sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas. Sasaran strategis ini mendukung pencapaian tujuan pertama, yaitu menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

Sasaran Strategis 2: Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I. Sasaran strategis ini mendukung pencapaian tujuan yang ketiga, yaitu meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.

2.2. Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Statistik Sosial 2020-2024

Arah dan kebijakan strategi Kedeputian Bidang Statistik Sosial dalam penyediaan data dan informasi statistik merupakan turunan dari arah dan kebijakan strategi BPS yang termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020–2024.

2.2.1. Arah kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Kedeputian Bidang Statistik Sosial berfokus pada 2 (dua) dari 3 (tiga) arah dan kebijakan strategi yang dicanangkan oleh BPS yaitu:

1. Menyediakan data Statistik Sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Peningkatan kualitas data statistik sosial;
- b. Penilaian penjaminan kualitas statistik dasar; dan
- c. Penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar.

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Meningkatkan akurasi data statistik sosial;
 - b. Memastikan kemutakhiran data melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. Melakukan koordinasi untuk dapat meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus;
 - d. Mengembangkan penerapan *Small Area Estimation* (SAE) dalam penyediaan data statistik sosial;
 - e. Menerapkan *big data* dalam penyediaan data statistik sosial;
 - f. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral melalui *National Quality Assurance Framework* (NQAF);
 - g. Memastikan penggunaan standar dan metodologi data statistik sosial di Indonesia;
 - h. Adaptasi terhadap perubahan metodologi di tingkat internasional; dan
 - i. Menugaskan statistisi dalam pelaksanaan kegiatan survei/sensus.
2. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka "Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN" yaitu penguatan statistik sektoral di K/L/D/I.

Arah kebijakan yang ingin diraih yaitu:

- a. Penguatan implementasi SSN; dan
- b. Penyediaan statistik sektoral

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mendukung tercapainya arah dan kebijakan ini antara lain:

- a. Membina *stakeholder* dalam kegiatan produksi statistik;
- b. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I;
- c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menghasilkan statistik sosial. Saat ini sudah banyak K/L/D/I yang mendapatkan asistensi dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial;
- d. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina SSN melalui pembinaan kepada pegawai terkait Satu Data Indonesia (SDI);
- e. Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral di bidang statistik sosial;
- f. Memaksimalkan peran BPS khususnya Deputi Bidang Statistik Sosial untuk SDI. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: Satu Data Bencana; Satu

Data Ketenagakerjaan; Satu Data Kependudukan; Satu Data Migrasi; dan Satu Data Kriminal; serta

- g. Menambah intensitas audiensi dengan K/L/D/I terkait untuk meningkatkan penjaminan kualitas data sektoral.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Statistik Sosial 2023

Dokumen perjanjian kinerja ditandatangani oleh Deputi Bidang Statistik Sosial dan Kepala BPS pada tanggal 14 Januari 2023. Dalam dokumen tersebut ditetapkan satuan dan target yang harus dicapai pada tahun 2023 dari setiap indikator sesuai tujuan/sasaran strategis.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Deputi Bidang Statistik Sosial

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas	Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data	Persen	96
	Persentase indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen	100
	Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di Bidang Statistik Sosial			
Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial (%)	Persen	97
	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Persen	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban dari Kedeputian Bidang Statistik Sosial dalam rangka menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun secara periodik. Pengukuran kinerja diperlukan untuk memonitor pencapaian kinerja pada perjanjian kinerja, selanjutnya membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian setiap indikator kinerja. Keberhasilan atau kegagalan suatu kinerja dilihat melalui hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan melalui indikator kinerja utama.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/ kegiatan di masa yang akan datang. Analisis akuntabilitas kinerja terdiri dari keberhasilan, kegagalan, tingkat efisiensi, hambatan/kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif untuk lebih meningkatkan kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial di masa yang akan datang. Dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu juga dilakukan evaluasi dan analisis atas perbandingan antara:

- a. Realisasi Kinerja dengan kinerja yang direncanakan.
- b. Realisasi Kinerja dengan kinerja tahun sebelumnya.
- c. Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir
- d. Realisasi Kinerja dengan Kinerja yang direncanakan Jangka Menengah (tahun 2023)

Pada tahun 2023, Kedeputian Bidang Statistik Sosial mempunyai 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran dan IKU telah diukur capaian kinerjanya setiap triwulanan. Capaian kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial tahun 2023 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2023, dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Utama pada masing-masing tujuan maupun sasaran, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut akan menjadi capaian Indikator apabila nilainya sama atau kurang dari 120 persen. Bagi Indikator yang nilai capaiannya lebih dari 120 persen, maka nilai capaian kinerja yang disajikan pada laporan kinerja adalah 120 persen. Sementara, simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	>100	Sangat Baik (A)	Kegiatan yang dilakukan telah melampaui target indikator kinerja
2	75-99	Baik (B)	Kegiatan yang dilakukan telah mencapai target indikator kinerja
3	55-74	Cukup (C)	Kegiatan yang dilakukan telah mendekati target indikator kinerja
4	<54	Kurang (K)	Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai target indikator kinerja

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial pada tahun 2023 adalah sebesar 108,15 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial sebesar 106,48 persen, sehingga di tahun 2023 ini terdapat peningkatan sebesar 1,67 persen poin dan dapat disimpulkan bahwa kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial di tahun 2023 lebih baik. Jika dibandingkan terhadap target capaian, Kedeputian Bidang Statistik Sosial telah melampaui target 100,00 persen yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial semakin meningkat. Meskipun demikian, kendala-kendala yang dialami pada Kedeputian Bidang Statistik Sosial di tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga perlu dievaluasi.

Capaian tujuan Kedeputian Bidang Statistik Sosial "Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan" dihitung dari nilai rata-rata capaian dari tiga indikator yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Sedangkan capaian tujuan "Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN", dihitung dari dua indikator. Secara detail capaian tersebut terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2022 (persen)

Indikator	Uraian	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1	Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	103,21	101,08
Sasaran 1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas	103,21	101,08
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	111,39	118,75
Sasaran 2	Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	111,39	118,75
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Total		106,48	108,15

Pada tahun 2023, rata-rata capaian pada indikator sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas” adalah sebesar 101,08 persen, sedangkan rata-rata capaian pada indikator sasaran “Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I” adalah sebesar 118,75 persen. Dengan demikian, rata-rata capaian kinerja sasaran secara total adalah sebesar 108,15 persen pada tahun 2023. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator capaian telah masuk dalam kategori A (sangat baik) karena nilainya lebih dari 100 persen.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2023

Kode	Uraian	Satuan	Kedeputian Bidang Statistik Sosial			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1 Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					101,08	A
S1	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang Berkualitas				101,08	A

Kode	Uraian	Satuan	Kedeputian Bidang Statistik Sosial			Nilai
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Persen	96,97	100,00	103,23	A
1.2	Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Persen	100,00	100,00	100,00	A
1.3	Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Persen	100,00	100,00	100,00	A
T2 Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN					118,75	A
S2	Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I				118,75	A
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari kedeputian bidang Statistik Sosial (%)	Persen	97,56	114,63	117,50	A
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Persen	100,00	159,26	120,00	A

Lebih lanjut, pada sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang Berkualitas” keseluruhan indikator kinerja utama telah mencapai 100 persen, sehingga keseluruhan indikator berkategori A. Begitu pula untuk sasaran ‘Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN’, keseluruhan indikator kerjanya juga berkategori A karena nilainya lebih dari 100 persen, bahkan capaian dua indikator pada sasaran tersebut melebihi 100 persen (Tabel 3.3).

3.1.1. Capaian IKS 1.1.1. Persentase Publikasi Statistik Sosial yang Menyertakan Informasi Akurasi Data

Pengukuran Indikator “Persentase publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data” diukur dengan menghitung jumlah publikasi yang menyertakan informasi

akurasi data dibagi dengan jumlah publikasi yang berbasis survei dikalikan dengan 100 persen. Nilai akurasi dalam publikasi ditunjukkan melalui tabel nilai *Relative Standard Error* (RSE) dari indikator hasil survei. Dalam suatu survei, terdapat kesalahan (*error*) yang disebabkan *sampling error* dan *non sampling error*. RSE dapat digunakan untuk mengukur tingkat presisi dari suatu nilai estimasi. RSE merupakan rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi dari suatu indikator yang dinyatakan dalam persentase. Estimasi suatu indikator dapat dikatakan tepat menggambarkan nilai yang sebenarnya jika memiliki nilai $RSE < 25$ persen, sebaliknya jika memiliki $RSE \geq 25$ persen maka dianggap tidak presisi. RSE yang tinggi (≥ 25 persen) merupakan suatu indikasi bahwa sampel tidak mencukupi, sehingga estimasi indikator yang dihasilkan sebaiknya tidak digunakan.

Tabel 3.4. Persentase Publikasi Statistik Sosial yang Menyertakan Informasi Akurasi Data, Tahun 2023

Indikator	Uraian	Satuan	Kedepatian Bidang Statistik Sosial Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Persen	96,97	100,00	103,23	A

Capaian kinerja pada IKS “Persentase publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data” tahun 2023 adalah 103,23 persen yang merupakan gabungan dari capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan; Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Tabel 3.5. Persentase Publikasi Statistik Sosial yang Menyertakan Informasi Akurasi Data Berdasarkan Direktorat, Tahun 2023

No	Direktorat	Satuan	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan	Persen	100,00	105,88	105,88	A

2	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	100,00	100,00	A
3	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	A

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa capaian kinerja “Persentase publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data” untuk Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan serta Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mencapai 100 persen di tahun 2023, bahkan untuk Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat melebihi 100 persen (105,88 persen). Capaian kinerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang melampaui 100 persen ini dikarenakan terdapat tambahan satu publikasi yang menyertakan akurasi yang berhasil dirilis pada tahun 2023 oleh Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, yaitu Publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023. Hal ini menyebabkan jumlah publikasi Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat yang menyertakan informasi di tahun 2023 menjadi sebanyak 18 publikasi dan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 17 publikasi.

Secara keseluruhan, terdapat 32 publikasi yang menyertakan informasi akurasi data yang telah diterbitkan oleh Kedepatian Bidang Statistik Sosial di tahun 2023 seperti yang disampaikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Daftar Publikasi dengan Menyertakan Nilai Akurasi Data yang Diterbitkan Kedepatian Bidang Statistik Sosial, Tahun 2023

No.	Judul Publikasi	Direktorat
(1)	(2)	(3)
1	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2023	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
2	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2023	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
3	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2023	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
4	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2023	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
5	Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
6	Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2023	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
7	Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2023	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
8	Statistik Pendapatan Februari 2023	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
9	Statistik Pendapatan Agustus 2023	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan

No.	Judul Publikasi	Direktorat
(1)	(2)	(3)
10	Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2022	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
11	Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
12	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
13	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
14	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, September 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
15	Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
16	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
17	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
18	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Maret 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
19	Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
20	Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
21	Statistik Pendidikan 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
22	Statistik Pemuda Indonesia 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
23	Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
24	Profil Anak Usia Dini 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
25	Statistik Kesehatan 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
26	Statistik Perumahan dan Permukiman 2022	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
27	Profil Statistik Kesehatan 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
28	Perkembangan SDGs Kesejahteraan Rakyat 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
29	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
30	Statistik Kriminal 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

No.	Judul Publikasi	Direktorat
(1)	(2)	(3)
31	Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
32	Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Kendala yang dihadapi Kedepujian Bidang Statistik Sosial dalam mencapai indikator “Persentase publikasi statistik sosial yang menyertakan informasi akurasi data” yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan Innas dan Inda Sakernas dan Susenas 2023 dilaksanakan secara *online*. Dalam pelatihan *online* ini, sering terjadi permasalahan jaringan dan fokus perhatian peserta pelatihan yang seringkali harus terbagi dengan kegiatan lain di waktu yang sama, sehingga hasilnya kurang optimal.
2. Meskipun pelatihan petugas Susenas 2023 dapat dilaksanakan secara tatap muka di setiap kabupaten/kota, namun lamanya waktu pelatihan yang hanya dua hari dirasakan menjadi kendala dalam penyampaian materi Susenas yang cukup banyak.
3. Kekosongan jabatan Kepala BPS menghambat penandatanganan kata pengantar pada publikasi yang akan terbit pada triwulan III tahun 2023.
4. Rilis publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat dinilai terlalu jauh dengan jadwal rilis data kemiskinan yang bersumber dari data Susenas pada periode yang sama.
5. Periode pelaksanaan lapangan Sakernas Agustus 2023 lebih pendek dikarenakan penyesuaian jadwal akibat adanya pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 pada bulan Juni-Juli 2023. Hal ini menyebabkan BPS Kabupaten/Kota harus melakukan penyesuaian alokasi petugas lapangan dan penyesuaian anggaran yang terkait.
6. Dalam proses validasi data Sakernas, ditemukan adanya data-data ekstrem atau tidak wajar sehingga memerlukan konfirmasi dari BPS daerah.
7. Penyusunan publikasi dilakukan di tengah kepadatan kegiatan internal maupun pembinaan sektoral dengan K/L lain sehingga memerlukan pengetatan jadwal penyusunan.
8. Penyusunan Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023 yang memuat data sekunder dari Kementerian/Lembaga memerlukan waktu yang cukup lama sekitar 4-5 bulan (pengiriman surat permintaan data pada bulan Mei dan baru mendapatkan balasan pada bulan Oktober) untuk memperoleh informasi/data dari K/L terkait. Hal ini dapat menghambat penyelesaian penyusunan publikasi.

9. Penghitungan nilai akurasi (RSE) yang cukup rumit dan memerlukan ketelitian karena adanya perubahan susunan pertanyaan pada kuesioner.
10. Penundaan pelaksanaan kegiatan Long Form Sensus Penduduk 2020 karena *refocusing* pada tahun 2021 sehingga baru dilaksanakan di tahun 2022. Hal ini menyebabkan beberapa output LF SP2020 yang seharusnya rilis di 2022 menjadi rilis pada tahun 2023.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mencapai indikator tersebut antara lain:

1. Akan diusulkan ke Biro Perencanaan untuk penyediaan anggaran pelatihan Innas dan Inda secara *offline*.
2. Jadwal pelatihan petugas Susenas dibuat hingga malam hari agar semua materi dapat disampaikan kepada petugas.
3. Selama masa kekosongan jabatan kepala BPS dan belum ada Plt. yang ditunjuk, kata pengantar ditandatangani oleh Deputi Bidang Statistik Sosial.
4. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat memajukan target rilis publikasi satu bulan lebih awal dari jadwal ARC.
5. Melakukan monitoring dan pengetatan jadwal pada tahap pelaksanaan lapangan Sakernas serta mengatur ulang alokasi petugas lapangan dan penyesuaian anggaran yang terkait.
6. Dilakukan konfirmasi data baik melalui *email* maupun *Whatsapp* ke BPS daerah terkait data-data ekstrem yang ditemukan pada hasil Sakernas.
7. Melakukan monitoring dan koordinasi bersama tim penyusun publikasi untuk melakukan penyesuaian jadwal penyusunan publikasi agar dapat memenuhi jadwal yang ditentukan.
8. Melakukan koordinasi secara intensif dengan K/L terkait baik dengan mengirimkan surat resmi permintaan data ke K/L terkait serta menghubungi secara personal dengan PIC K/L terkait. Selain itu, karena data sekunder yang diperoleh dari K/L seringkali melebihi tenggat waktu yang ditentukan, sehingga perlu melakukan pengetatan jadwal penyusunan publikasi agar dapat terbit tepat waktu.
9. Penambahan personil untuk mengolah RSE dan penambahan waktu untuk penghitungan RSE dan melakukan *capacity building* penyusunan RSE publikasi.

10. Kendala akibat tertundanya kegiatan Long Form SP2020 yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2021 menjadi di tahun 2022 menyebabkan harus melakukan revisi PK 2022 dan PK 2023 terkait tersedianya output LFSP2020.

3.1.2. Capaian IKS 1.1.2. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan dalam Dokumen RPJMN (%)

Persentase indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN menunjukkan kemampuan Kedepatian Bidang Statistik Sosial untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan dalam dokumen RPJMN sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Capaian kinerja indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah indikator statistik sosial yang menjadi target akan digunakan dalam dokumen RPJMN dengan jumlah realisasi indikator RPJMN yang sudah tercapai oleh Kedepatian Bidang Statistik Sosial. Persentase indikator ini diukur dengan menghitung jumlah indikator di Kedepatian Bidang Statistik Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN dibagi dengan jumlah indikator RPJMN yang harus disediakan oleh seluruh direktorat di Kedepatian Bidang Statistik Sosial dikalikan dengan 100 persen.

Tabel 3.7. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan dalam Dokumen RPJMN, Tahun 2023

Indikator	Uraian	Satuan	Kedepatian Bidang Statistik Sosial Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.2	Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Persen	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa target capaian kinerja "Persentase indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN" di Kedepatian Bidang Statistik Sosial adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kedepatian Bidang Statistik Sosial telah menyediakan indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pengukuran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Tabel 3.8. Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN, Berdasarkan Direktorat, Tahun 2023

No	Direktorat	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan	Persen	100,00	100,00	100,00
2	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	100,00	100,00
3	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00

Tabel 3.8 menyajikan capaian kinerja “Persentase indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN” dari setiap direktorat di Kedepuitan Bidang Statistik Sosial. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing direktorat di Kedepuitan Bidang Statistik Sosial memiliki capaian kinerja sebesar 100 persen.

Pada dokumen RPJMN 2020-2024, terdapat 28 indikator yang dihitung dari data Sakernas, Susenas, dan survei-survei lainnya yang dilakukan oleh Kedepuitan Bidang Statistik Sosial di tahun 2023. Indikator tersebut mencakup indikator langsung maupun indikator sebagai penyusun indeks komposit yang disajikan dalam publikasi yang diterbitkan BPS maupun dalam tabel dinamis di *website* BPS. Daftar indikator RPJMN yang dihasilkan Kedepuitan Bidang Statistik Sosial pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Daftar Indikator Statistik Sosial yang Digunakan dalam Dokumen RPJMN Kedepuitan Bidang Statistik Sosial, Tahun 2023

No.	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)
1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
2	Angka kematian ibu (MMR)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
3	Angka kematian bayi (IMR)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
4	ASFR 15-19 tahun	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
5	Rasio kewirausahaan nasional (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan
6	Pertumbuhan wirausaha (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan

No.	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)
7	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
8	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
10	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
11	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
12	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
13	Persentase lulusan PT yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
15	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
16	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
17	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
18	Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%) a. SD/MI/ sederajat b. SMP/MTs/ sederajat c. SMA/SMK/MA/sederajat	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
19	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (%)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
20	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
21	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya a. SMA/SMK/MA/Sederajat b. Pendidikan Tinggi	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
22	Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)
23	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
24	Indeks Demokrasi Indonesia	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
25	Koefisien Gini Ratio September 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
26	Koefisien Gini Ratio Maret 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
27	Data Kemiskinan September 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
28	Data Kemiskinan Maret 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Kendala yang dihadapi Kedeputusan Bidang Statistik Sosial dalam mencapai kinerja indikator “Persentase indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN,” yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya konsistensi, ketepatan, dan ketelitian dalam penghitungan indikator yang bersumber dari Susenas dan Sakernas.
2. Kendala saat penyusunan target indikator yang digunakan dalam RPJMN 2023, karena beberapa indikator dalam RPJMN hasil Sakernas yang telah dipublikasikan mengalami sedikit perbedaan dibandingkan dokumen RPJMN tahun 2023.
3. Pengolahan indikator yang bersamaan dengan kegiatan lain, yaitu pengolahan tabulasi untuk publikasi dan permintaan data dari pengguna lain yang membuat rentang pengerjaan pengolahan data semakin singkat.
4. Kendala lainnya adalah adanya penundaan kegiatan Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) di tahun 2021 karena *refocusing* anggaran, sehingga LF SP2020 baru dilaksanakan di tahun 2022. Hal ini menyebabkan beberapa output LF SP2020 yang terkait dokumen RPJMN yang seharusnya rilis di 2022 menjadi rilis di 2023.
5. Pelatihan Fasilitator FGD IDI dilaksanakan secara daring. Hal ini menjadi masalah karena beberapa fasilitator FGD IDI Provinsi adalah pegawai yang sebelumnya belum pernah mengerjakan IDI. Sementara pelatihan fasilitator secara daring cenderung membuat peserta pelatihan kurang fokus dengan pelatihan yang sedang berlangsung. Hal ini berdampak pada banyaknya temuan yang ditemukan pada saat FGD IDI Provinsi melalui supervisi pelaksanaan FGD IDI.
6. Beberapa K/L/D yang menjadi produsen data beberapa indikator IDI terlambat memberikan data yang menyebabkan keterlambatan proses verifikasi data.

7. Terbatasnya waktu dikarenakan adanya kegiatan tambahan menyebabkan beberapa kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memerlukan penguatan dari direktorat lain. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk penghitungan kemiskinan Maret 2023 terdapat penambahan tim dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan *briefing* dan melakukan pembagian tugas ulang dengan melibatkan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mencapai kinerja indikator tersebut antara lain:

1. Penyusunan sintaks dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh satu orang.
2. Penentuan target indikator berdasarkan dari dokumen RPJMN tahun 2022, kemudian realisasi indikator ditentukan dari dokumen RPJMN tahun 2023.
3. Pada tahap pengolahan data, dilakukan pembagian kerja pada tim pengolahan agar dapat memenuhi permintaan data indikator yang digunakan dalam RPJMN sekaligus tersedianya tabulasi publikasi.
4. Dilakukan revisi PK 2022 dan PK 2023 karena kegiatan LF SP2020 yang terkendala *refocusing* anggaran.
5. Kegiatan supervisi FGD IDI dilaksanakan untuk membantu fasilitator saat mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya dalam memfasilitasi FGD IDI Provinsi. Kedepannya diperlukan pelatihan yang dilaksanakan secara luring.
6. Tim IDI Pusat berusaha melakukan *follow-up* pada PIC K/L/D yang bersangkutan untuk segera mengirimkan data yang diminta. Sementara itu, tim IDI Provinsi melakukan *follow-up* pada lembaga atau pemerintah daerah yang bertindak sebagai produsen data IDI di tingkat daerah. Kemudian, tim IDI Pusat melakukan percepatan kegiatan verifikasi supaya tidak melebihi timeline yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Untuk melakukan *briefing* dan pembagian tugas dilaksanakan beberapa kali rapat untuk mencapai pemahaman bersama.

3.1.3. Capaian IKS 1.1.3. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan Sebagai Indikator SDGs (%)

Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs menunjukkan kemampuan Kedepatian Bidang Statistik Sosial untuk menghasilkan data dan informasi statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs. Capaian kinerja indikator ini

diukur dengan membandingkan jumlah indikator SDGs bidang statistik sosial yang bisa dipenuhi dibagi jumlah indikator SDGs yang menjadi target Bidang Statistik Sosial.

Tabel 3.10. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs, Tahun 2023

Indikator	Uraian	Satuan	Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.3	Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Persen	100,00	100,00	100,00

Target capaian kinerja “Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs” adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen. Nilai tersebut merupakan gabungan dari capaian kinerja Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Tabel 3.11. Persentase Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs Berdasarkan Direktorat, Tahun 2023

No	Direktorat	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan	Persen	100,00	100,00	100,00
2	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persen	100,00	100,00	100,00
3	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00

Pada masing-masing direktorat, yaitu Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, target capaian kinerja “Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs” adalah 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen dan capaian kinerja

100 persen. Pada tahun 2023, terdapat 54 indikator SDGs yang dihasilkan oleh Kedepuitan Bidang Statistik Sosial sebagaimana disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Daftar Indikator Statistik Sosial yang Digunakan sebagai indikator SDGs yang Dihasilkan Kedepuitan Bidang Statistik Sosial, Tahun 2023

No.	Kode	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
2	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
3	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
4	3.7.2* dan 5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (ASFR)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
5	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
6	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
7	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
9	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
10	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
11	8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
12	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (%)	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
13	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

No.	Kode	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)	(4)
14	1.2.2*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
15	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan (FIES)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
16	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
17	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
18	16.9.1*	Persentase anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
19	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
20	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
21	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
22	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
23	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
24	4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
25	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
26	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
27	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
28	11.1.1.(a)	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
29	3.1.2*	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

No.	Kode	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)	(4)
		terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan	
30	1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar.	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
31	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
32	3.8.1.[a]	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
33	3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
34	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
35	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
36	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
37	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
38	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
39	10.3.1.(a)	Indikator: 10.3.1(a) Indeks Kebebasan	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
40	11.7.2*	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
41	16.1.3.(a)	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
42	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	
43	16.5.1*	16.5.1 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

No.	Kode	Indikator	Direktorat
(1)	(2)	(3)	(4)
		kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12	
44	16.5.2*	16.5.2 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
45	16.7.2.(a)	16.7.2.(a) Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
46	16.7.2.(b)	16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
47	16.7.2.(c)	16.7.2.(c) Indeks Aspek Kesetaraan	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
48	10.1.1*	Koefisien <i>Gini Ratio</i> September 2022 (SDGs Indikator	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
49	10.1.1*	Koefisien <i>Gini Ratio</i> Maret 2023	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
50	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%) September 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
51	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%) Maret 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
52	10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%) Maret 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
53	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%) September 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
54	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas (%) Maret 2022	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Kendala yang dihadapi Kedeputian Bidang Statistik Sosial dalam mencapai indikator “Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs” yaitu sebagai berikut:

1. Penghitungan indikator memerlukan ketelitian karena perubahan sintaks yang digunakan terkait perubahan nomor urut pertanyaan dalam kuesioner.

2. Angka yang dihasilkan Sakernas Agustus 2022 mampu menyajikan indikator ketenagakerjaan hingga level kabupaten/kota, namun tidak semua indikator dalam SDGs dapat disajikan hingga level kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan nilai RSE (Relative Standar Error) yang cukup tinggi.
3. Belum seluruh indikator hasil Susenas dapat disajikan hingga level kabupaten/kota karena RSE yang tinggi.
4. Kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) yang diterapkan BPS berdampak pada pelaksanaan PODES yang menyebabkan pendataan tidak dapat dilaksanakan
5. Kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) juga diimplementasikan untuk Kegiatan Statistik Modul Hansos 2023 pada Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), sehingga indikator SDGs dari survei tersebut tidak dapat dihasilkan.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan sintaks dilakukan secara berlapis, tidak hanya oleh satu orang.
2. Kendala indikator SDGs yang memiliki nilai RSE yang cukup tinggi, diatasi dengan strategi menyajikan data SDGs hanya sampai level provinsi.
3. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan Polstat STIS dalam mengembangkan metode SAE.
4. Pendataan yang tidak dilaksanakan menyebabkan tidak tersedianya data terkini sehingga untuk menghasilkan Publikasi Podes (Kabupaten dan Kecamatan) digunakan data hasil pendataan Podes tahun 2021.
5. Jika ada permintaan data terkait indikator SDGs dari modul ketahanan sosial, indikator yang diberikan adalah indikator yang terakhir kali dirilis.

3.1.4. Capaian IKS 2.2.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedepujian Bidang Statistik Sosial (%)

Indikator kinerja sasaran “Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedepujian Bidang Statistik Sosial” diukur dengan menghitung jumlah K/L/D/I yang telah mendapatkan pembinaan statistik dibagi dengan jumlah seluruh K/L/D/I yang menjadi target pembinaan statistik, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2023, K/L/D/I yang direncanakan mendapat pembinaan statistik adalah sebanyak 41 K/L/D/I dengan persentase target sebesar 97,56 persen. Daftar K/L/D/I yang menjadi target dan realisasi pelaksanaan pembinaan statistik Kedepujian Bidang Statistik Sosial tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Target dan Realisasi K/L/D/I yang Mendapat Pembinaan Statistik dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial

IKS 2.2.1	Target K/L/D/I	Realisasi K/L/D/I
(1)	(2)	(3)
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial (%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia 2. BAPPENAS 3. BKKBN 4. BMKG 5. BNPB 6. BP2MI 7. BPIP 8. DitjenPAS 9. Kejaksaan 10. Kemenag 11. Kemendagri 12. Kemendes PDTT 13. Kemendikbudristek 14. Kemenhub 15. Kemenkes 16. Kemenkeu 17. Kemenko Ekonomi 18. Kemenko PMK 19. Kemenkopolkumham 20. Kemenkomham (Ditjen Imigrasi) 21. Kemenparekraf 22. Kemenpora 23. Kemensos 24. Kementan 25. Kemenlu 26. Kemnaker 27. KKP 28. KLHK 29. Kominfo 30. KPK 31. KPPPA 32. KPU 33. MA 34. "National Food Agency (NFA)/ Badan Pangan Nasional" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia 2. BAPPENAS 3. BMKG 4. BNPB 5. BP2MI 6. BPIP 7. DitjenPAS 8. Kejaksaan 9. Kemendagri 10. Kemendes PDTT 11. Kemendikbudristek 12. Kemenhub 13. Kemenkes 14. Kemenkeu 15. Kemenko Ekonomi 16. Kemenko PMK 17. Kemenkopolkumham 18. Kemenkomham (Ditjen Imigrasi) 19. Kemenparekraf 20. Kemenpora 21. Kemensos 22. Kementan 23. Kemenlu 24. Kemnaker 25. KKP 26. KLHK 27. Kominfo 28. KPK 29. KPPPA 30. KPU 31. MA 32. "National Food Agency (NFA)/ Badan Pangan Nasional" 33. Polri 34. PPATK

IKS 2.2.1	Target K/L/D/I	Realisasi K/L/D/I
(1)	(2)	(3)
	35. Polri 36. PPATK 37. Provinsi Sumatera Utara 38. PUPR 39. Setwapres 40. TNP2K	35. Provinsi Sumatera Utara 36. PUPR 37. Setwapres 38. TNP2K 39. BPHN 40. Bapanas 41. BNPT 42. Dukcapil 43. ESDM 44. Kemenko Marves 45. Ombudsman 46. Sekretariat Kabinet 47. World Bank

Berdasarkan tabel 3.13, realisasi K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial pada tahun 2022 adalah sebanyak 47 K/L/D/I atau 114,63 persen. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa terdapat perubahan K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dibandingkan K/L/D/I yang ditargetkan. BKKBN dan Kementerian Agama pada awalnya ditargetkan mendapat pembinaan statistik tetapi kegiatan pembinaan statistik pada kedua kementerian/lembaga tersebut tidak dapat terealisasi karena adanya berbagai kendala. Sementara itu, BPHN, Bapanas, BNPT, Dukcapil, ESDM, Kemenko Marves, Ombudsman, Sekretariat Kabinet, dan *World Bank* yang di awal tidak masuk dalam target, tetapi pada realisasinya menerima pembinaan statistik dari Kedepuitan Bidang Statistik Sosial. Oleh karena itu, realisasi K/L/D/I yang mendapat pembinaan adalah sebesar 114,63 persen dari target 97,56 persen, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 117,50 persen.

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 2.2.1) Kedepuitan Bidang Statistik Sosial

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS.2. Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I							
IKS 2.2.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari	persen	87,80	90,24	102,80	97,56	114,63	117,50

Kendala IKS 2.2.1

Dalam merealisasikan indikator kinerja sasaran ini, pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain:

1. Kegiatan pembinaan statistik sektoral dengan K/L/D/I dilakukan di tengah padatnya jadwal internal dan kesibukan masing-masing K/L/D/I sehingga sulit mengatur waktu untuk melakukan pembinaan.
2. Pelaksanaan kegiatan SDMI 2023 yang melibatkan K/L lain terkendala dalam aspek waktu yang memerlukan komitmen semua pihak agar kegiatan dapat diikuti secara bersamaan oleh semua K/L yang terkait.
3. Komunikasi ke beberapa K/L/D/I membutuhkan pendekatan lebih personal agar surat dan informasi yang dikirimkan dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan baik oleh K/L/D/I.
4. Terdapat kerja sama baru dan permintaan pembinaan oleh K/L/D/I di luar target yang sudah ditentukan.
5. K/L/D/I membutuhkan pendampingan secara intensif untuk pembangunan standar data dan metadata untuk data-data yang dihasilkan oleh K/L/D/I.
6. Masih terdapat K/L yang belum memiliki walidata karena tidak memiliki unit organisasi yang menangani data. Selain itu pemahaman K/L terhadap kegiatan statistik secara umum maupun statistik sektoral belum merata.

Strategi IKS 2.2.1

Sementara itu, strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan kerjasama serta melakukan koordinasi intensif agar kerjasama dapat terselenggara dengan baik dan lancar sesuai waktu yang ditentukan, serta tetap dapat menepati jadwal kegiatan rutin internal agar tepat waktu.
2. Melakukan monitoring dan koordinasi secara intensif dengan K/L/D/I terkait dalam kolaborasi penyediaan data/informasi yang diperlukan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Mengupayakan mencari kontak personal dari perwakilan K/L/D/I untuk melengkapi persuratan yang dikirim secara resmi.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan K/L terkait untuk menyusun *timeline* kegiatan yang efektif dan efisien sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan tepat

waktu, serta perlunya melakukan pembagian kerja dengan memanfaatkan SDM yang tersedia seoptimal mungkin sesuai kompetensi.

5. Mengikutsertakan tim standar data dan tim metadata BPS untuk melakukan pendampingan penyusunan standar data dan metadata serta menunjuk PIC/penanggungjawab untuk setiap K/L/D/I untuk koordinasi dan kolaborasi lebih intens dalam penyusunan standar data dan metadata.
6. Mengadakan pertemuan pembinaan statistik sektoral dengan mengundang K/L mitra kerja.

3.1.5. Capaian IKS 2.2.2 Persentase Aktivitas Pembinaan Statistik yang Dilakukan untuk K/L/D/I yang Telah Direalisasikan (%)

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah kegiatan atau aktivitas pembinaan statistik yang telah dilakukan dibagi dengan jumlah seluruh aktivitas pembinaan statistik untuk K/L/D/I yang direncanakan, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Target aktivitas pembinaan statistik sosial yang direncanakan di tahun 2023 adalah sebesar 54 aktivitas dengan persentase sebesar 100 persen. Rincian target dan realisasi aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15. Target dan Realisasi Jumlah Aktivitas Pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I, Tahun 2023

IKS 2.2.2	Target		Realisasi	
	K/L/D/I	Jumlah Aktivitas	K/L/D/I	Jumlah Aktivitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BAPPENAS	4	BAPPENAS	12
	BPHN		BPHN	1
	Bapanas		Bapanas	1
	BKKBN	1	BKKBN	
	BMKG	1	BMKG	1
	BNPB	1	BNPB	1
	BNPT		BNPT	1
	BPIP	1	BPIP	1
	DitjenPAS	1	DitjenPAS	1
	ESDM		ESDM	1
	Kejaksanaan	1	Kejaksanaan	1
	Kemendagri	2	Kemendagri	7
	Kemendes PDTT	1	Kemendes PDTT	1
	Kemendikbudristek	3	Kemendikbudristek	3

IKS 2.2.2	Target		Realisasi	
	K/L/D/I	Jumlah Aktivitas	K/L/D/I	Jumlah Aktivitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kemenkes	3	Kemenkes	3
	Kemenkeu	2	Kemenkeu	4
	Kemenko Ekonomi	1	Kemenko Ekonomi	1
	Kemenko Marves		Kemenko Marves	1
	Kemenko PMK	2	Kemenko PMK	7
	Kemenkopolkam	1	Kemenkopolkam	1
	Kemenparekraf	9	Kemenparekraf	8
	Kemenpora		Kemenpora	1
	Kemensos	1	Kemensos	1
	Kementan	3	Kementan	3
	Kemenlu	2	Kemenlu	0
	KKP	1	KKP	2
	KLHK	1	KLHK	1
	Kominfo	1	Kominfo	1
	KPK	1	KPK	2
	KPPPA	3	KPPPA	8
	MA	1	MA	1
	<i>National Food Agency (NFA)/Badan Pangan Nasional</i>	1	<i>National Food Agency (NFA)/Badan Pangan Nasional</i>	1
	Ombudsman		Ombudsman	1
	Polri	1	Polri	1
	PPATK	1	PPATK	1
	PUPR	1	PUPR	1
	Sekretariat Kabinet		Sekretariat Kabinet	1
	Setwapres	1	Setwapres	1
	TNP2K	1	TNP2K	1
	World Bank		World Bank	1
	Kememkop UKM		Kememkop UKM	2
Jumlah Aktivitas		54		88

Realisasi K/L/DI yang mendapat pembinaan statistik pada tahun 2023 adalah sebanyak 88 aktivitas atau 162,96 persen. Hal tersebut karena terdapat beberapa K/L/D/I yang menambah aktivitas, serta pelaksanaan aktivitas pembinaan dengan BPHN, Bapanas, BNPT, Dukcapil, ESDM, Kemenko Marves, Ombudsman, Sekretariat Kabinet, dan *World Bank* yang

tidak terdapat pada target sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 untuk indikator aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I adalah 120 persen.

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 2.2.2) Kedeputan Bidang Statistik Sosial

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SS.2. Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I							
IKS 2.2.2 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	persen	100	173,33	120,00	100,00	162,96	120,00

Kendala IKS 2.2.2

Dalam merealisasikan indikator kinerja sasaran ini, pada tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain:

1. Dalam tahap penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkendala pada aspek waktu, pihak Kemenparekraf perlu waktu untuk menelaah data apa yang dibutuhkan serta identifikasi konsep dan definisi operasional yang akan digunakan.
2. Terselenggaranya kerja sama baru dengan KemenkopUKM yang tidak direncanakan pada awal tahun, memerlukan strategi agar kegiatan kerjasama dapat berjalan lancar.
3. K/L/D/I membutuhkan pendampingan secara intensif untuk pembangunan standar data dan metadata untuk data-data yang dihasilkan oleh K/L/D/I.
4. Sulit untuk menentukan jadwal kegiatan agar dapat dihadiri oleh semua K/L yang dibina.
5. Terdapat kesulitan dalam mengatur waktu yang tepat untuk melakukan pembinaan kepada K/L/D/I secara tatap muka, seperti pembahasan hasil *exercise* Indeks Desa dengan Bappenas, pembahasan kolaborasi data desa dengan Kemendagri, pembinaan data lingkungan hidup dengan *The Framework of Development Environment Statistics* (FDES) 2013 kepada KLHK dan Kementan, dan lain sebagainya.
6. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan pembinaan statistik sektoral.
7. Belum seragamnya konsep aktivitas pembinaan statistik sektoral menyebabkan tingginya realisasi pada aktivitas pembinaan statistik sektoral.

8. Rencana pertemuan pembinaan statistik sektoral dengan K/L mitra kerja Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat harus ditunda dari rencana semula karena menunggu nilai EPSS K/L dirilis. Selain itu, belum terdapat acuan baku dalam penyelenggaraan aktivitas pembinaan statistik sektoral

Strategi IKS 2.2.2

Sementara itu, strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Menyusun *timeline* dan menentukan tenggat waktu agar pihak Kemenparekraf dapat segera mengidentifikasi dan memutuskan konsep definisi operasional data yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan Kemenparekraf.
2. Terselenggaranya kerjasama baru dengan KemenkopUKM yang tidak direncanakan pada awal tahun sehingga perlu mengatur jadwal kegiatan kerjasama dengan KemenkopUKM dengan ketat dan membentuk tim kerja sesuai kompetensi secara optimal.
3. Turut melibatkan tim standar data dan tim metadata BPS untuk melakukan pendampingan penyusunan standar data dan metadata serta menunjuk PIC/penanggungjawab untuk setiap K/L/D/I untuk koordinasi dan kolaborasi lebih intens dalam penyusunan standar data dan metadata.
4. Mempersiapkan kegiatan agar diusahakan tidak mendadak dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan K/L secara intensif agar diperoleh kesepakatan waktu untuk dapat menghadiri kegiatan.
5. Beberapa cara untuk mengatasi kendala waktu, antara lain:
 - Melakukan aktivitas pembinaan secara daring seperti pembahasan hasil *exercise* Indeks Desa terbaru.
 - Mengusahakan untuk selalu memperoleh informasi terbaru terkait jadwal K/L target pembinaan secara berkala. Dengan informasi tersebut diharapkan dapat mengatur waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan.
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada POK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
7. Menyeragamkan konsep aktivitas pembinaan statistik sektoral dengan melakukan pembatasan terhadap aktivitas pembinaan statistik sektoral menurut tema.
8. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Diseminasi Statistik dan Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral BPS.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kedeputan Bidang Statistik Sosial merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2023, dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja utama pada masing-masing tujuan maupun sasaran, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hal ini dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan pada rencana kerja di tahun berikutnya. Perkembangan capaian kinerja Kedeputan Bidang Statistik Sosial pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Perkembangan Capaian Kinerja Kedeputan Bidang Statistik Sosial Tahun 2022-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
			2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1: Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
SS1: Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas	1.1 Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data	Persen	103,12	103,23
	1.2 Persentase indikator Statistik Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	Persen	106,52	100
	1.3 Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	Persen	100	100
T2 : Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
SS2: Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I	2.1. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari kedeputan bidang Statistik Sosial	Persen	102,78	117,50
	2.2 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Persen	120	120
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran			106,48	108,15

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas Kedeputan Bidang Statistik Sosial tahun 2023 memperlihatkan capaian yang sangat baik.

Capaian indikator kinerja Kedepuitan Bidang Statistik Sosial tahun 2023 terhadap perjanjian kinerja memiliki rata-rata capaian sebesar 108,15 persen, mengalami peningkatan 1,67 persen dibanding tahun 2022. Apabila ditelaah dari capaian masing-masing indikator sasaran, 4 dari 5 indikator sasaran di tahun 2023 mengalami peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun 2022. Penurunan terjadi pada indikator sasaran "Persentase indikator Statistik Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN", dari yang semula sebesar 106,52 persen di tahun 2022 menjadi 100 persen di tahun 2023. Meskipun demikian, penurunan ini tidak serta merta dimaknai sebagai hal yang negatif dikarenakan capaian kinerja 100 persen di tahun 2023 menunjukkan bahwa semua target yang ditetapkan berhasil dicapai.

3.3 Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2020-2024

Perbandingan capaian kinerja tahunan terhadap rencana kinerja jangka menengah merupakan hal yang yang perlu dipantau. Pengukuran capaian kinerja Kedepuitan Bidang Statistik Sosial tahun 2023 terhadap Renstra dihitung berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target Renstra yang dinyatakan dalam persen, pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator kinerja. Kedepuitan Bidang Statistik Sosial telah melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap rencana kinerja jangka menengah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Tahun 2021-2023 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2020-2024

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	2021		2022		2023	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 1: Menyediakan data Statistik Sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan								
Sasaran 1: Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas								
IKS 1.1.1 Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	persen	100,00	96	109	100	103,12	100	103,23
IKS 1.1.2 Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	persen	100,00	100	100	106,52	106,52	100	100

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	2021		2022		2023	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKS 1.1.3 Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	persen	100,00	116	118	100	100	100	100
Tujuan 2: Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN								
Sasaran 2: Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I								
IKS 2.2.1 Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari keputuan bidang Statistik Sosial (%)	persen	100,00			90,24	102,78	114,63	118
IKS 2.2.2 Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	persen	100,00			173,33	120	162,96	120
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran			109		106,48		108,15	

Dari tabel tersebut, pada tahun 2023, capaian kinerja sudah optimal. Bahkan terdapat 3 dari 5 IKS dengan capaian kinerja lebih dari 100 persen. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 108,15 persen.

3.4. Prestasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, ketiga direktorat di lingkungan Kedepuitan Bidang Statistik Sosial, yaitu Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, serta Direktorat Statistik ketahanan Sosial telah berhasil memperoleh penghargaan maupun prestasi baik secara unit kerja maupun perorangan. Berikut beberapa penghargaan/prestasi yang berhasil ditorehkan selama tahun 2023 menurut masing-masing direktorat :

1. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Sepanjang tahun 2023, prestasi yang diraih oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, antara lain:

- 1) Juara Terbaik 3 (tiga) sebagai Unit Pengolah dengan hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2023 di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- 2) Publikasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan termasuk ke dalam 10 Publikasi dengan unduhan terbanyak Tahun 2023.
- 3) Tim Sakernas menjadi peringkat ke-2 nilai SIQAF tertinggi dari 21 survei yang telah dinilai.

Selain itu, secara perorangan, ada beberapa pegawai Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memperoleh penghargaan atas prestasi baik pada *event* nasional maupun internasional, diantaranya adalah:

- 1) Ali Said menjadi *Keynote Speaker* pada *Conference on Social Faultlines in Indonesia: Persistence and Change in An Evolving Landscape, 29-30 August 2023*, ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapore tanggal 29-30 Agustus 2023
- 2) Ali Said menjadi peserta dan pemateri pada *Inter-Sectoral Workshop on the Implementation and Monitoring of the ASEAN Roadmap on Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2025 to be held on 15-16 May 2023*, in Bangkok, Thailand tanggal 15-16 Mei 2023
- 3) Ali Said menjadi anggota *UN Expert Working Group on "the Revision on the Principles and Recommendation of Population and Housing Census for the 2030 Round"* tanggal 27 April 2023
- 4) Ali Said menghadiri pertemuan *UN Expert Group Meeting on the Revision on Principles and Recommendation of Population and Housing Censuses for the 2030 Round, 11-15 December 2023*, New York tanggal 11-15 Desember 2023
- 5) Ari Purbowati menghasilkan karya tulis yang berhasil dipublikasikan pada *Journal of Population Research* dengan judul "*Does diversity matter for development? New evidence of ethnic diversity's mediation between internal migration and economic growth across Indonesia's regions*"
- 6) Diah Ikawati menjadi *speaker* dalam *Joint Meeting of the Steering Group of the ESCAP Committee on Statistics*
- 7) Diah Ikawati Menjadi *speaker* dalam *ASEAN High Level Forum on Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025*
- 8) Diah Ikawati mengikuti acara *Australia Awards Awardee on Short Course entitled "Governing in the Digital Age (The Use of Data for Better Policies and Public Services)"*

- 9) Diah Ikawati menjadi *speaker* dalam Webinar SESRIC "*Transforming Administrative Registers for Statistical for Statistical Data Production*"
- 10) Diah Ikawati menjadi moderator dalam *Launching State of World Population Report 2023 "8 Billion Lives, Infinite Possibilities: The Case for Rights and Choices"*
- 11) Diah Ikawati menjadi member *UNESCAP Data Integration Community of Practice*
- 12) Diah Ikawati menjadi *member Steering Group of the ESCAP Committee on Statistics*
- 13) Diah Ikawati menjadi peserta dalam *United Nations - International Development Partners Meeting on Long Term Population Census*
- 14) Putricia Synthesa menjadi penulis pada jurnal "*The Effect of Regional Characteristics and Women's Autonomy on Infant and Young Child Feeding Practice*"
- 15) Alfina Fasriani menjadi peserta *Multi-country Workshop to Support Implementation of ICD-11*, Colombo, Sri Lanka
- 16) Alfina Fasriani dan Astrid Masitha Shabrina menjadi peserta *Pre-Training on Cleaning of Civil Registration Data*, Bangkok, Thailand
- 17) Alfina Fasriani dan Wida Siddihikara Perwitasari menjadi peserta *regional workshop on strengthening the national civil registration and vital statistics (CRVS) system*, in Bali
- 18) Alfina Fasriani dan Astrid Masitha Sabrina menjadi peserta *Regional Training on Assessing Inequalities in Civil Registration Completeness*, Bangkok, Thailand
- 19) Parwoto dan Viane Dorthea Tiwa menjadi panelis pada sesi panel di *3rd International Forum on Migration Statistics – IFMS 2023* tanggal 24-26 Januari 2023 di Chile
- 20) Fajar Santoso menjadi peserta *Workshop on Population Projections 16-20 October 2023*, Bangkok, Thailand
- 21) Erie Sadewo menjadi pembicara pada WEBINAR perkim.id SERI #36 / "Post-Suburbanisasi & Dampaknya pada Perkim"
- 22) Winida Albertha menjadi pembicara dalam *Safe and Fair: Results Sharing Forum* di Bangkok, Thailand, 27 November-1 Desember 2023
- 23) Winida Albertha mengikuti peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Badan Pusat Statistik, disampaikan bahwa Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan *Australian Bureau of Statistics* dalam *Leading in A National Statistics Office Workshop (LANSOW) 2023*, 17-21 Oktober 2023
- 24) Winida Albertha mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Inklusif dan Transformatif (KIT) dan *Women in Government Forum* yang diselenggarakan oleh Prospera, 27-31 Maret 2023

- 25) Yogo Aryo Jatmiko menjadi penulis pada jurnal *Indonesian Journal of Applied Statistics* dengan judul “Pemodelan Tingkat Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2021 dengan Pendekatan Regresi Logistik Ordinal”
- 26) Yogo Aryo Jatmiko menjadi penulis pada jurnal *Jurnal Litbang, Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, Vol. 7, No. 1, Mei 2023, Hal 118-128 dengan judul “Partisipasi Kerja Lansia Pada Rumah Tangga Tunggal Di Indonesia”
- 27) Suryo Adi Rakhmawan menjadi pemenang *Young Statistician Ambassador* oleh *International Statistical Institute 2023*
- 28) Suryo Adi Rakhmawan menjadi pemenang beasiswa dan pembicara *Young Statistician Forum dalam World Statistics Congress 2023*
- 29) Suryo Adi Rakhmawan menjadi pemenang dalam kompetisi *paper Regional Economic Modelling menggunakan data Sakernas di kompetisi East Java Economic (EJAVEC) Forum 2023*
- 30) Suryo Adi Rakhmawan menjadi pemenang dalam kompetisi *paper Regional Economic Modelling menggunakan data Sakernas di kompetisi West Java Economic Society (WJES) 2023*
- 31) Suryo Adi Rakhmawan menjadi *awardee Australia Awards Scholarship* dalam *Short Course: Skills Forecasting for the Fourth Industrial Revolution 2023*
- 32) Suryo Adi Rakhmawan memenangkan *Fully Funded Awards* dalam *Stochastic Numerics and Statistical Learning: Theory and Applications Workshop 2023*, KAUST Saudi Arabia
- 33) Suryo Adi Rakhmawan menjadi penulis dalam *paper Hotelling T2 Control Chart for Detecting Changes in Mortality Models Based on Machine-Learning Decision Tree*
- 34) Suryo Adi Rakhmawan menjadi penulis dalam *paper Gig Economy During Pandemic in East Java*
- 35) Suryo Adi Rakhmawan menjadi penulis dalam *paper From Micro to Green Macro: Exploring Technology Adoption and Sustainable Growth in West Java's MSMEs*
- 36) Suryo Adi Rakhmawan menjadi penulis dalam *paper Synergy between Economy and Ecology: Exploring the Economic Impacts of Green Infrastructure in West Java*
- 37) Suryo Adi Rakhmawan menjadi tim dalam *UN Big Data: Synthetic Mobile Positioning Data 2023*
- 38) Weni Lidya Sukma menjadi penulis dalam *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia* dengan judul “*Employment Formalization in Indonesia: Role of Parents' Employment Mobility Toward Children's Employment Mobility*”

- 39) Weni Lidya Sukma menjadi penulis dalam Jurnal Keluarga Berencana dengan judul “Keahlian Atau Kondisi Keluarga, Manakah Yang Lebih Berpengaruh Pada Capaian Pekerjaan Lansia?”
- 40) Weni Lidya Sukma menulis judul jurnal “Pengaruh Karakteristik Sosiodemografi Kepala Rumah Tangga dan Anak Terhadap Kecenderungan Anak Terlibat dalam Pekerjaan Berbahaya di Sektor Pertanian: Analisis Data SAKERNAS”
- 41) Rachmi Agustiyani menjadi peserta *Dissemination Workshop of Data for Development Phase 2*
- 42) Al Huda Yusuf menjadi *Change Champion* Terbaik Tahun 2023
- 43) Uray Naviandi menghadiri pertemuan *ASEAN High Level Forum on Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025*
- 44) Uray Naviandi menjadi pembicara pada *International Conference on the Nexus of Disability and Trafficking in Persons*, December 2023, Bangkok, Thailand
- 45) Uray Naviandi menjadi penulis *paper* "Social Determinants of Maternal and Early Life Mortality in Indonesia 2010-2021: A block census level log-linear regression analysis" bersama Universitas Indonesia
- 46) Mariet Tetty Nuryetty menghadiri *21st International Conference of Labour Statisticians: the Centenary* (Geneva, 11-20 October 2023)

Selain prestasi perorangan yang disebutkan diatas, beberapa inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan kegiatan Duknaker Sharing (D’Ring) secara *online* dimana narasumbernya adalah pegawai yang baru saja menyelesaikan Tugas Belajarnya (Pasca Sarjana).
- 2) Pengembangan SDM lainnya yaitu penyediaan makanan dan minuman ringan dengan transaksi yang dilakukan mandiri atau biasa disebut dengan Kantin Mujur (Mobilitas Jujur).
- 3) Pengembangan Dashboard SSHI yang memiliki fungsi sebagai aplikasi simulasi penghitungan statistik hayati dan analisis singkat dari indikator yang menggambarkan peristiwa penting.
- 4) Pengembangan Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) yaitu Dokumen Usulan Rancangan Cetak Biru dan Peta Jalan SDMI 2023-2028, Panduan Konsep dan Definisi Migrasi Internasional dan Migrasi Tenaga Kerja Internasional, Ringkasan Kebijakan Tata Kelola SDMI, *Prototype* Portal SDMI.

5) Pengembangan pengolahan data pada Sakernas telah menerapkan *Dynamic Weighting*.

2. **Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat**

Selama tahun 2023 Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mencatatkan prestasi diantaranya:

- 1) Keikutsertaan pegawai Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam pelatihan di luar negeri antara lain:
 - a. Idha Sahara, S.Si, M.Si mengikuti *6th Meeting of The Sub-Group on Gender Statistics Training (SGGST)* yang diselenggarakan oleh UN Women pada tanggal 4-8 Juni 2023 di Chiba, Jepang
 - b. Idha Sahara, S.Si, M.Si mengikuti *8th Meeting of The Sub-Group on Gender Statistics Training (SGGST)* yang diselenggarakan oleh UN Women pada tanggal 13-17 November 2023 di Bangkok, Thailand
 - c. Ofi Ana Sari, S.ST., M.E.K.K mengikuti *Subregional Training on Gender Statistics for Monitoring the Sustainable Development Goals* yang diselenggarakan oleh UNSIAP dan KOSTAT di Daejeon, Korea Selatan pada tanggal 30 Oktober s.d 3 November 2023
 - d. Siswi Puji Astuti, S.S.T., S.E., M.Si dan Sapta Hastho Ponco, S.S.T., M.Stat menerima Australia Awards Fellowship "*Mapping Child Malnutrition Trends and Determinants in Indonesia with Spatial Epidemiology and Bayesian regression*" yang diselenggarakan pada tanggal 5 November s.d 3 Desember 2023 di *University of Sydney*, Australia
- 2) Siswi Puji Astuti, S.S.T., S.E., M.Si terpilih sebagai Insan Statistik Teladan Kedepujian Bidang Statistik Sosial Tahun 2023.

3. **Direktorat Statistik Ketahanan Sosial**

Selama tahun 2023, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mencatat beberapa prestasi diantaranya :

- 1) Tulisan dari pegawai mengenai berbagai tema terkait Ketahanan Sosial berikut:
 - a. Potret Buram Kekerasan pada Perempuan oleh Agus Pramono
 - b. *Food Insecurity and Extreme Poverty in Indonesia* oleh I Made Giri Suyasa dan Nuri Taufiq.
 - c. Naiknya Angka Kemiskinan oleh Lili Retnosari, tayang tanggal 27 Januari 2023 pada kanal detik.com

- d. Menilik Angka Kemiskinan oleh Lili Retnosari, tayang tanggal 28 Februari 2023 pada kanal kompas.id
 - e. Mencatat Pertanian Indonesia oleh Lili Retnosari, tayang tanggal 7 Juni 2023 pada kanal koranindopos.com
 - f. Pentingnya SP oleh Lili Retnosari, tayang tanggal 16 Juni 2023 pada kanal mediaindonesia.com
 - g. Peran dan Tantangan SP oleh Lili Retnosari, tayang tanggal 17 Juni 2023 pada kanal koranindopos.com
 - h. Siapkan Masuk “*Upper Middle Incomen Country*” Lagi? oleh Nuri Taufiq, tayang tanggal 17 Juli 2023 pada kanal detik.com
 - i. Pulau-Pulau Data Perlindungan Sosial oleh Udin Suchaini, tayang tanggal 11 Juli 2023 pada kanal detik.com
 - j. *Short Term Solution and Human Mobility Changes to Control the Widespread of Covid-19 in Indonesia* oleh Udin Suchaini, terbit pada *Journal of Namibian Studies Vol.34*, Mei 2023
 - k. *Pro Environmental Behaviour and Social Capital in Indonesia 2021: A Micro Data Analysis* oleh Winda Sartika Purba, terbit pada *International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol.18, No.7, July 2023*
- 2) Terpilihnya beberapa pegawai Hansos sebagai pegawai terbaik di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berdasar nilai inti berakhlak, yakni:
 - a. Jamila sebagai *employee of the quart* pada triwulan 1
 - b. I Kadek Dede Dwipayana sebagai *employee of the quart* pada triwulan 2
 - c. Udin Suchaini sebagai Insan Statistik Teladan pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
 - 3) Keikutsertaan Direktorat dalam **Studi Banding/Studi Visit ke Australia**
 - a. Pada tanggal 23-29 September 2023 berkunjung ke Canberra, Australia dalam rangka Studi Banding Tata Kelola Data dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional
 - b. Pada 24-28 Juli 2023, beberapa pegawai berkunjung ke Australian Bereau of Statistics (ABS) dalam rangka “*Study Visit on Crime and Justice Statistics Development*”
 - 4) Ikut sertanya pegawai, Tsuraya Mumtaz, mengikuti *kNOwVAWdata course* dari UNFPA. Kursus diselenggarakan tanggal 21 Agustus – 1 September 2023 di Bangkok, Thailand dan tanggal 23 Oktober – 3 November 2023 di Melbourne, Australia

- 5) Pegawai Hansos yang menjadi pembicara dalam *event* internasional, yaitu:
 - a. Trophy Endah Rahayu, narasumber dalam kegiatan *ICCS Forum & Third Regional Advisory Group Meeting for the Centre of Excellence for Statistics on Crime and Criminal Justice in Asia and the Pacific* yang diselenggarakan oleh UNODC tanggal 23-25 Oktober 2023
 - b. Trophy Endah Rahayu, narasumber dalam kegiatan *Regional Training on Measuring SDG 16 in Asia Pacific* tanggal 25 Mei 2023
 - c. Lutfi Alfia, narasumber dalam kegiatan *Webinar of Transforming administrative Registers for Statistical Data Production* yang diselenggarakan oleh SESRIC tanggal 14 Februari 2023

Selain itu selama tahun 2023, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga telah berinovasi dengan menghasilkan:

- 1) Perubahan skema lingkungan kerja Hansos dari yang ada sekat menjadi satu ruangan gabungan yang disebut *Flexible Working Space* (FWS) yang lebih memfasilitasi kolaborasi antar pegawai Hansos
- 2) Kompilasi berbagai tulisan pegawai Hansos yang digabungkan dalam Satu Suro (Satu Tahun Satu Produk)
- 3) Grup percakapan *online* ECHO (English Club Hansos) untuk mengembangkan kompetensi pegawai Hansos dalam berbahasa Inggris
- 4) Harmonis, yakni kegiatan berkelompok untuk menjalin kekompakan di Hansos dalam bentuk aktivitas senam, makan, dan permainan bersama
- 5) Sharing Hansos dalam bentuk webinar/seminar/sharing yang menyediakan media aktualisasi pegawai Hansos
- 6) Kegiatan Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) yang berperan penting dalam meningkatkan literasi statistik terutama di desa
- 7) Dalam rangka penerapan SDI Tematik, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Ketahanan Sosial, yaitu Kegiatan Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI), Kegiatan Satu Data Desa Indonesia (SDDI), dan Kegiatan Satu Data Lingkungan Hidup Indonesia (SDLHI).

3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Deputi Bidang Statistik Sosial didukung oleh dana yang bersumber dari APBN serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

(PHLN). Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Deputi Bidang Statistik Sosial telah didasarkan pada Rencana Strategis Deputi Bidang Statistik Sosial tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/ penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial Berdasarkan Direktorat Periode 2023

Unit Kerja	2023		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan	8.812.100.000	7.912.627.694	89,79
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	2.900.700.000	2.769.962.725	95,49
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	36.858.262.000	31.462.362.403	85,36
Total	48.571.062.000	42.144.952.822	86,77

Secara total, pagu Deputi Statistik Sosial adalah sebesar Rp. 48.571.062.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.144.952.822,- atau sebesar 86,77 persen.

Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial Berdasarkan Sasaran dan Program Periode 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Program		Realisasi Anggaran		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
[2905] Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan		8.812.100.000	7.912.627.694	89,79
T1	Menyediakan data statistik kependudukan dan ketengakerjaan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	8.737.683.000	7.899.313.694	90,40
S1	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Kependudukan dan Ketengakerjaan yang berkualitas	8.737.683.000	7.899.313.694	90,40
1.1	Persentase publikasi statistik kependudukan dan ketengakerjaan yang menyertakan informasi akurasi data (%)	8.737.683.000	7.899.313.694	90,40

Tujuan/Sasaran Strategis/Program		Realisasi Anggaran		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi
1.2	Persentase Indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)			
1.3	Persentase indikator statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)			
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di Bidang Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	74.417.000	13.314.000	82,11
S2	Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	74.417.000	13.314.000	82,11
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (%)	74.417.000	13.314.000	82,11
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)			
[2906] Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat		2.900.700.000	2.769.962.725	95,49
T1	Menyediakan data Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	2.827.652.000	2.708.277.370	95.79
S1	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	2.827.652.000	2.708.277.370	95.79
1.1	Persentase publikasi statistik kesejahteraan rakyat yang menyertakan informasi akurasi data (%)			
1.2	Persentase Indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	2.827.652.000	2.708.277.370	95.79
1.3	Persentase indikator statistik kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)			
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat	73.048.000	61.685.355	84,44
S2	Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Kesejahteraan Rakyat	73.048.000	61.685.355	84,44
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (%)	73.048.000	61.685.355	84,44
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)			
[2907] Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial		36.858.262.000	31.462.362.403	85,36
T1	Menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	36.788.660.000	31.398.409.505	85,35
S2	Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas	36.788.660.000	31.398.409.505	85,35
1.1	Persentase Publikasi Statistik Ketahanan Sosial yang diakses konsumen (%)			
1.2	Persentase Indikator statistik ketahanan sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	36.788.660.000	31.398.409.505	85,35
1.3	Persentase indikator statistik ketahanan sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)			
T2	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang statistik ketahanan sosial	69.602.000	63.952.898	91,88
S2	Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik ketahanan sosial	69.602.000	63.952.898	91,88

Tujuan/Sasaran Strategis/Program		Realisasi Anggaran		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realiasi
2.1	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (%)	69.602.000	63.952.898	91,88
2.2	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)			

3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi dilakukan Deputi Bidang Statistik Sosial mencakup sisi anggaran dan non anggaran. Upaya efisiensi ini sesuai dengan surat edaran dari Menteri Keuangan tanggal 9 Desember 2022 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dimana adanya arahan dari presiden dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk dilakukan suatu langkah strategis pada tahun 2023 dengan melanjutkan kebijakan *Automatic Adjustment* dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi didapatkan dengan cara sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{(Pagu Anggaran Rp \times Capaian Kinerja \%) - Realisasi Anggaran Rp}{Pagu Anggaran Rp \times Capaian Kinerja \%} \times 100\%$$

Tabel 3.21. Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Statistik Sosial Berdasarkan Direktorat Periode 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Program	Capaian Kinerja (%)	Pagu TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan						
Tujuan 1. Menyediakan data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
SS1: Tersedianya data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	108,00	8.812.100.000	7.912.627.694	90,40	16,29
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di Bidang Statistik Kependudukan dan ketenagakerjaan						
SS2: Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I	Pembinaan Statistik Sektoral Kependudukan dan Ketenagakerjaan	108,00	74.417.000	13.314.000	17,89	83,43

Tujuan/ Sasaran Strategis	Program	Capaian Kinerja (%)	Pagu TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat						
Tujuan 1. Menyediakan data Statistik Kesejahteraan Rakyat untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
SS1: pemanfaatan data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	102,00	2.827.652.000	2.708.277.370	95,8	93,9
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional di bidang kesejahteraan rakyat						
SS2: Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I di bidang Statistik Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan Statistik Sektoral Kependudukan dan Ketenagakerjaan	112,90	73.048.000	61.685.355	84,4	74,8
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial						
Tujuan 1. Menyediakan data Statistik Ketahanan Sosial untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
SS1: Meningkatnya pemanfaatan data Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	100	36.788.660.000	31.398.409.505	85,35	14,65
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang statistik ketahanan sosial						
SS2: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	120	69.602.000	63.952.898	91,88	23,43

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh Deputi Statistik Sosial adalah:

1. Dari segi kegiatan, beberapa kegiatan di Direktorat digabungkan seperti kegiatan kegiatan penganugerahan Award Desa Cantik yang diintegrasikan dengan rilis hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Penganugerahan Pojok Statistik, dan Penganugerahan EPSS.
2. Mengkonversi beberapa kegiatan paket *meeting* yang semula dirancang dalam bentuk *fullboard* menjadi *fullday*, sehingga bisa menambah volume baik jumlah kegiatan rapat maupun jumlah peserta rapat.

3. Dari sisi sumber daya energi, dilakukan penghematan listrik dengan cara mematikan lampu atau alat elektronik lainnya yang tidak digunakan, efisiensi penggunaan air yang diupayakan melibatkan seluruh staf sehingga penggunaan fasilitas kantor dapat diefisienkan.
4. Penggunaan media *online* dalam pelaksanaan rapat.
5. Pelaksanaan beberapa pelatihan dilakukan secara *online*, kecuali pelatihan petugas dilakukan secara *offline*.
6. Penggunaan media *online* dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
7. Penghematan dalam penggunaan kertas, dengan cara tidak mengalokasikan anggaran pencetakan publikasi melainkan hanya menyediakan versi *softcopy*, mencetak draft laporan dan dokumen lainnya yang masih akan dikoreksi dengan menggunakan kertas bekas atau melalui *softfile*.
8. Membatasi penggunaan tinta printer dengan menggunakan mode “hemat” saat



BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial pada tahun 2023 secara rata-rata mencapai 108,15 persen, dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 86,77 persen. Dari lima indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Sosial dengan Kepala Badan Pusat Statistik, seluruh indikator kinerja mampu memenuhi target yaitu sebesar 100 persen, bahkan 3 dari 5 indikator memiliki capaian yang melebihi 100 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial, baik dari keseluruhan indikator tujuan maupun pada masing-masing indikator sasaran, telah mencapai nilai 100 persen atau lebih dan masuk dalam kategori A (sangat baik).

Kedeputian Bidang Statistik Sosial pada tahun 2023 berhasil mempertahankan capaian kinerja dalam kategori A sebagaimana capaian kinerja pada tahun 2022. Indikator kinerja dengan capaian kinerja tertinggi pada tahun 2023 adalah “Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan” yang mencapai 120 persen. Apabila ditelaah dari capaian masing-masing indikator sasaran, 4 dari 5 indikator sasaran di tahun 2023 mengalami peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun 2022. Penurunan terjadi pada indikator sasaran “Persentase indikator Statistik Sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN”, dari yang semula sebesar 106,52 persen di tahun 2022 menjadi 100 persen di tahun 2023. Meskipun demikian, penurunan ini tidak serta merta dimaknai sebagai hal yang negatif dikarenakan capaian kinerja 100 persen di tahun 2023 menunjukkan bahwa semua target yang ditetapkan berhasil dicapai.

Anggaran Kedeputian Bidang Statistik Sosial secara keseluruhan sebesar Rp 48.571.062.000,- yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, serta Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial. Sampai dengan 31 Desember 2023, serapan anggaran seluruh kegiatan adalah sebesar Rp 42.144.952.822,- atau 86,77 persen dari total anggaran.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya meningkatkan nilai capaian kinerja seperti yang telah ditetapkan pada renstra tahun 2020-2024, perbaikan yang harus dilakukan Kedeputian Bidang Statistik Sosial pada tahun mendatang adalah:

1. Melakukan perencanaan anggaran bersama Biro Perencanaan agar penyerapan anggaran lebih optimal;
2. Menyelenggarakan sesi pembelajaran mandiri untuk pelatihan baik pelatihan instruktur maupun pelatihan petugas, memperkuat koordinasi dengan BPS daerah, dan lebih selektif dalam menetapkan variabel dalam kuesioner sehingga muatan materi yang disampaikan dapat sesuai dengan keterbatasan waktu pelatihan petugas.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui keikutsertaan pada pelatihan, seminar, ataupun workshop. Di samping itu, kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 sehingga peningkatan kualitas SDM semakin baik
4. Menambah personil untuk mengolah RSE dan penambahan waktu untuk penghitungan RSE;
5. Menerapkan penyusunan sintaks tabulasi indikator dan statistik secara berlapis, tidak hanya oleh satu orang;
6. Melakukan revisi PK 2022 dan Revisi Renstra 2020-2024 terkait kendala indikator SDGs yang baru bisa dirilis tahun 2023 berdasarkan hasil LF SP2020.
7. Mengupayakan koordinasi secara terus-menerus dengan K/L/D/I agar target pelaksanaan kegiatan pembinaan bisa terealisasi;
8. Berkoordinasi dengan Tim Penilai Badan BPS untuk menjadikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor sebagai dasar aktivitas pembinaan pada K/L/D/I mitra kerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial.

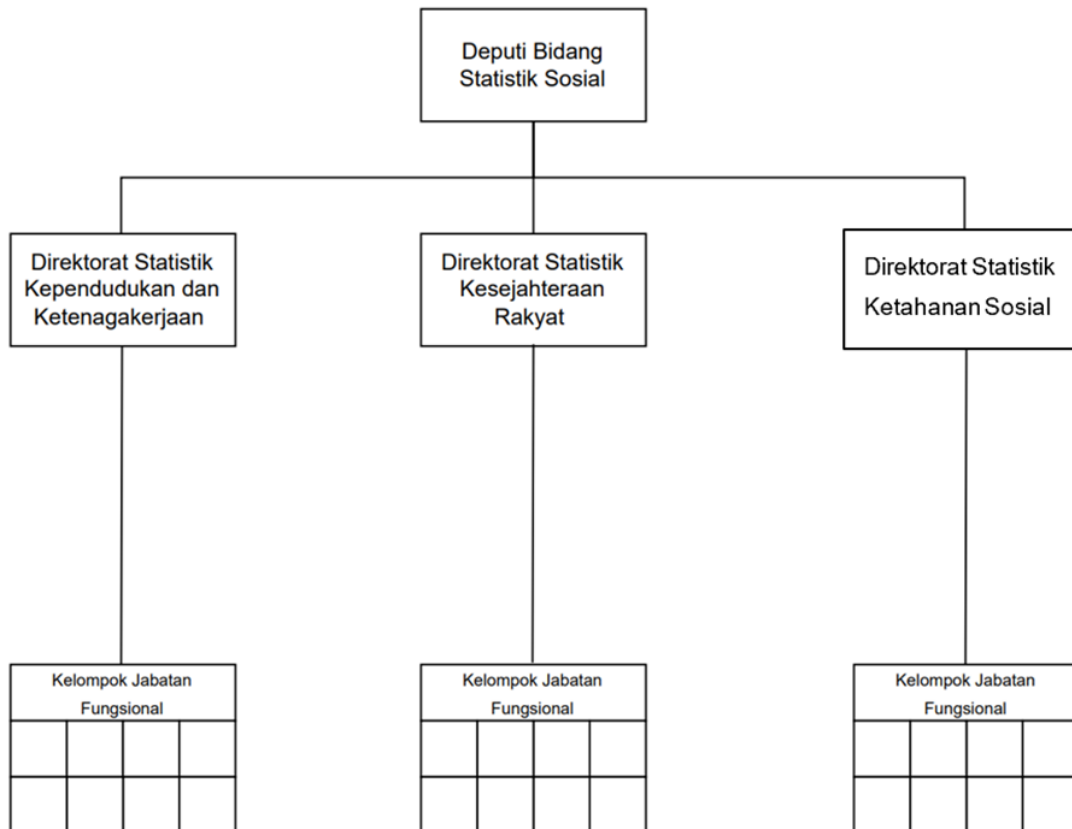


LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Kedepuitan Bidang Statistik Sosial BPS



Lampiran 2. Rencana Strategis Kedeputan Bidang Statistik Sosial BPS Tahun 2020-2024 (Reviu)

Tujuan/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1. Menyediakan data Statistik Sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.					
S.1.1. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sosial yang berkualitas					
Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data	77	88	96	96	96
Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN	100	100	100	100	100
Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs	98	98	100	100	100
Tujuan 2. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
S.2.1. Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I					
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari kedeputan bidang Statistik Sosial	100	94	87	97	100
Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan		100	100	100	100

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Statistik Sosial BPS Tahun 2023 (Reviu)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ateng Hartono SE, M.Si
Jabatan : Deputy Bidang Statistik Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

Jakarta, 14 Januari 2023
Pihak Pertama

Dr. Ateng Hartono SE, M.Si
NIP. 19690109 199211 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL

Tujuan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik sosial yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas	Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Persen	96
	Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Persen	100
	Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN di bidang statistik sosial			
Penguatan statistik sektoral di K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari kedeputian bidang Statistik Sosial (%)	Persen	97
	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Persen	100

Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Rp. 17.906.894.000,-
2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Rp. 9.542.316.000,-
3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	Rp. 12.776.782.000,-
Jumlah	Rp. 40.225.992.000,-

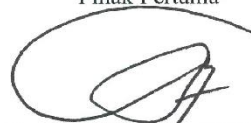
Pihak Kedua



Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

Jakarta, 14 Januari 2023

Pihak Pertama



Dr. Ateng Hartono SE, M.Si
NIP. 19690109 199211 1 001

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Statistik Sosial Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sosial yang berkualitas	Persentase publikasi statistik Sosial yang menyertakan informasi akurasi data (%)	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	28,13	28,13	100,00
			TW III	34,38	34,38	100,00
			TW IV	96,88	100,00	103,22
	Persentase Indikator statistik sosial yang digunakan dalam dokumen RPJMN (%)	Persen	TW I	21,43	21,43	100,00
			TW II	21,43	21,43	100,00
			TW III	67,86	67,86	100,00
			TW IV	100,00	100,00	100,00
	Persentase indikator statistik sosial yang digunakan sebagai indikator SDGs (%)	Persen	TW I	61,11	61,11	100,00
			TW II	61,11	61,11	100,00
			TW III	74,07	74,07	100,00
			TW IV	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari kedeputian bidang Statistik Sosial (%)	Persen	TW I	53,66	51,22	95,45
			TW II	70,73	78,05	110,34
			TW III	80,49	107,32	120,00
			TW IV	97,56	114,63	117,50
	Persentase aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan (%)	Persen	TW I	40,74	53,70	120,00
			TW II	51,85	81,48	120,00
			TW III	79,63	131,48	120,00
			TW IV	100,00	162,96	120,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id